

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Akmal. *et al. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Padang: Get Press Indonesia, 2023)
- Anatami, Darwis. *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dan Kepailitan*. (Yogyakarta: Deepublish, 2021)
- Arifin, Johan. *et.al. Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang)*. (Semarang: Walisongo Press, 2019)
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan*. (Yogyakarta: Andi, 2020)
- Darus, Mariam. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999)
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2018)

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2018)
- Huizink, J. B. *Insolventie*. (Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004)
- Lontoh, Rudhy A. *et.al. Penyelesaian Utang-Piutang: Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung: Alumni, 2001)
- Mertikusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2002)
- Muchsin. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006)
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Bandung, Citra Adtya Bakti, 2000)
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung: Alumni, 2006)
- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008)
- Situmorang, Viktor M. dan Hendri Soekarso. *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008)

_____, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009)

_____, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. (Jakarta: Intermedia, 2015)

Sutedi, Adrian. *Hukum Hak Tanggungan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Suyanto, Anton. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. (Jakarta: Kencana, 2016)

Tejaningsih, Titik. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2021)

Tumbuan, Fred B. G. *Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh PERPU No. 1/1998 Dalam Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Kepailitan Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung: Alumni, 2001)

Usanti, Trisadini Prasastinah. *Prinsip Kehati-Hatian Pada Transaksi Perbankan*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2013)

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)

Wijayanta, Tata. *Undang-Undang dan Praktik Kepailitan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016)

Yahanan, Annalisa. *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang Piutang)*. (Palembang: Unsri, 2007)

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri hukum Bisnis*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019)

B. Jurnal Internasional/ Jurnal Nasional

Achmad, Fathiya. *et.al.* "Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan yang Dilakukan Kreditor Separatis dalam Keadaan Insolvensi". *Jurnal Nuansa Kenotariatan*. Vol. 3. No. 1 Juli 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.31479/jnk.v3i1.164>

Agnesia, Annisa Egis dan Christine S.T Kansil. "Keadaan Insolvensi dalam Permohonan Pailit Perusahaan sebagai Upaya Menjaga Kepentingan Kreditor dan Debitor menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU". *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 7, No. 10 Oktober 2022. DOI: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.12762>

Aria, Alim Wijaya. *et.al.* "Hak Eksekusi Kreditor Separatis terhadap Benda Agunan dalam Kepailitan". *Pactum Law Journal*. Vol. 2. No. 3 November 2019

Candini, Tivana Arbiani dan Reisar Alka. "Insolvensi Tes Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia". *Jurnal*

Gloria Justitia. Vol. 2, No. 2 November 2022. DOI:

<https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3900>

Dethia, Nadila Sandy. "Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai Jaminan dalam Perjanjian Utang Piutang". Indonesian Notary. Vol. 2. (2020)

Dewi, Putu Eka Trisna. "Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". Jurnal Hukum Saraswati (JHS). Vol.1. (2019)

Disemadi, Hari Sutra dan Danial Gomes. "Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia". Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Vol. 9. (2021). DOI: <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31436>

Isfardiyana, Siti Hapsah. "Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit". Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3. (2016). DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n3.a10>

Johanes, Romi. "Kajian Hukum Terhadap Likuidasi dan Kepailitan Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan". Lex et Societatis. Vol. 4. No. 4 April 2016. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v4i4.11895>

Juliantini, Ni Nyoman. et.al. "Prosedur dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby)". Jurnal Analogi

Hukum. Vol. 3. (2021). DOI:

<https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.101-105>

Kosasih, Putri Ayu Lestari. "Praktek Hak Eksekutorial Separatis Kreditor terhadap Debitor yang Dinyatakan Pailit pada Perbankan di Indonesia".

Lex Privatum. Vol. 1. No. 2 April 2013

Lie, Gunardi. et.al. "Problematic UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap Bank sebagai Kreditor Separatis". Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia. Vol. 2. No. 2 Februari 2020. DOI:

<https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7242>

Manogihon, Benedictus Hananta dan Ditha Wiradiputra. "Problematica Pengajuan PKPU oleh Kreditor berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU". UNES Law Review. Vol. 6. (2023).

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.895>

Mantili, Rai dan Putu Eka Trisna Dewi. "Perlindungan Kreditor Konkuren dalam Hukum Kepailitan". Jurnal Akses. Vol. 12. (2020). DOI:

<https://doi.org/10.47329/jurnalakses.v12i2.681>

Muryati, Dewi Tuti. et.al. "Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Kaitannya dengan Hak Kreditor Separatis". Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 19. (2017).

DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v19i1.682>

Natalia, Titie Syahnaz. "Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan". Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya. Vol. 16. (2018)

Nola, Luthvi Febryka. "Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan (*The Position of General Seizure Towards Others in The Process of Bankruptcy*)". Jurnal DPR RI. Vol.9. No.2 (2018)

Nursaid, Yusuf dan Annalisa Yahanan, "Akibat Hukum Kreditur Separatis atas Penetapan Masa Insolvensi yang Berlaku Surut dalam Proses Kepailitan." Lex Lata. Vol. 2. (2022). DOI: <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v2i3.528>

Pratama, Gede Aditya. "Hilangnya Tes Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia". Krtha Bhayangkara. Vol. 15. No. 1 Juni 2021. DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.450>

Putra, Fani Martiawan Kumara. "Eksistensi Kreditur Separatis Sebagai Pemohon Dalam Perkara Kepailitan". Perspektif. Vol. 19. (2014). DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i1.606>

Ramadhani, Wulandari Rima. "Kreditur Separatis vs Upah Buruh : Suatu Kajian Dalam Hukum Kepailitan". Media Iuris. Vol. 4. No. 1 Februari 2021. DOI : <https://doi.org/10.20473/mi.v4i1.24836>

Retnaningsih, Sonyendah. "Perlindungan Hukum terhadap Debitor Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia". ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata. Vol. 3. (2018). DOI: <https://doi.org/10.36913/jhaper.v3i1.41>

Sagala, Elviana. "Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk Menghindarkan Debitor dari Pailit". Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 3. (2015). DOI: <https://doi.org/10.36987/jiad.v3i1.389>

- Sambe, Newfriend N. "Fungsi Jaminan terhadap Pemberian Kredit oleh Pihak Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998". *Lex Crimen*. Vol. 5, (2016)
- Saputra, Imran Eka. "Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan". *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 23. (2020). DOI: <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.44>
- Silalahi, Udin dan Claudia. "Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Proses Kepailitan". *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 49. No. 1 Januari 2020. DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.35-47>
- Simanjuntak, Herry Anto. "Prinsip Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditor". *Justiqa*. Vol. 2. No. 2 Oktober 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.36764/justiqa.v2i2.458>
- Sularto. "Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Dalam Kepailitan". *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Vol. 24. (2012). DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16128>
- Syuhada, Teguh. "Pelaksanaan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa yang Berada di Tangan Pihak Ketiga dalam Penanganan Perkara Perdata". *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4. (2019). DOI: <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3163>
- Tampemawa, Stevi G. "Prosedur dan Tatacara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *Lex Privatum*. Vol. 7. (2019)

Tirayo. et.al. "Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU". Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol. 6. (2019). DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67631>

Wawointana, Riedel. "Manfaat Jaminan Fidusia dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank". Lex Privatum. Vol. 1. (2013)

Wijayanta, Tata. "Kajian tentang Pengaturan Syarat Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004". Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Vol. 26. (2014). DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16063>

Yusticia, Judistira dan Iza Rumesten. "Limitasi Hak Kreditor Separatis atas Pelunasan Piutang setelah Lampau Waktu Penjualan Jaminan Kebendaan dalam Proses Penyelesaian Kepailitan di Pengadilan Niaga". Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.2. (2022). DOI: <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v2i1.554>

C. Hasil Penelitian

Geme, Maria Theresia. "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat (Woe) dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur". Disertasi. Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012

Hanum, Habiba Hanum. “Analisis Terhadap Ketentuan Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan”. Skripsi. Medan: Program Studi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2007

Hartono, Dedy Tri. “Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan”. Disertasi. Palu: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2016

Muhamad, Nico Benardy. “Kedudukan Hukum Anak Perusahaan Sebagai Kreditor Terhadap Induk Perusahaan Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisa Putusan Nomor 142 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016)”. Skripsi. Jember: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018

Simanjuntak, Freddy. “Penangguhan Eksekusi (STAY) Benda Agunan Dalam Kepailitan”. Disertasi. Medan: Program Studi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008

Tejaningsih, Titik. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit”. Disertasi. Yogyakarta: Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah
Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha
Pergadaian

Keputusan KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku
Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28
Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit

E. Putusan

Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor Putusan Nomor: 15/Pdt. Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/Pn.Niaga.Smg

F. Website/Internet

Fakultas Hukum UMSU, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Dasar

Hukum dan Cara Pengajuannya”. [https://fahum.umsu.ac.id/penundaan-kewajiban-pembayaran-utang/#:~:text=Penundaan%20Kewajiban%20Pembayaran%20Utang%20\(PKPU\)%20adalah%20sebuah%20proses%20hukum%20yang,m enunda%20pembayaran%20utang%20kepada%20kreditur](https://fahum.umsu.ac.id/penundaan-kewajiban-pembayaran-utang/#:~:text=Penundaan%20Kewajiban%20Pembayaran%20Utang%20(PKPU)%20adalah%20sebuah%20proses%20hukum%20yang,m enunda%20pembayaran%20utang%20kepada%20kreditur)

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, “Fungsi dan Tujuan Perbankan di Indonesia”.

<https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/357-fungsi-dan-tujuan-perbankan-di-indonesia#:~:text=Merujuk%20pada%20ketentuan%20Pasal%203,ma syarakat%20dalam%20rangka%20pembangunan%20nasional>

Glints, “Bank: Apa Itu, Fungsi Umum Dan Khusus, Serta Jenis-Jenisnya”.

<https://glints.com/id/lowongan/jenis-jenis-bank/#:~:text=Bank%20sebagai%20agent%20of%20development,development%20adalah%20perkembangan%20perekonomian%20masyarakat>

Gramedia Blog, “Pengertian Bank: Fungsi, dan Jenis-Jenis Bank di Indonesia”.

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-bank/>

HukumOnline.Com, “2 Syarat Kepailitan dan Penjelasan”.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-kepailitan-cl1266/>

HukumOnline.Com, “2 Syarat Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi”.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/2-syarat-putusan-pkpu-bisa-diajukan-kasasi-lt6299dee06942a>

HukumOnline.Com, “5 Jenis dan Contoh Jaminan Kebendaan”.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-dan-contoh-jaminan-kebendaan-lt518f8c34e5c67/>

HukumOnline.Com, “Batas Waktu Kurator Membereskan Boedel Pailit Debitor dan Kesalahannya”.

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt647c2e9114a79/batas-waktu-kurator-membereskan-boedel-pailit-debitor-dan-kesalahannya/>

HukumOnline.Com, “Keuntungan PKPU dan Pihak yang Berhak Mengajukan PKPU dan Pailit”.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/keuntungan-pkpu-dan-pihak-yang-berhak-mengajukan-pkpu-dan-pailit-lt6357911ec2112/>

HukumOnline.Com, “Mengenal Berbagai Jenis Sita dalam Hukum Acara Perdata”.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-berbagai-jenis-sita-dalam-hukum-acara-perdata-lt5efecaabbaf83/>

HukumOnline.Com, “Mengenal Jaminan Perorangan, Corporate Guarantee, dan Bank Garansi”.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal->

[jaminan-perorangan--icorporate-guarantee-i--dan-bank-garansi-lt519d0870c12f3/](https://www.hukumonline.com/berita/a/mengintip-proses-eksekusi-harta-pailit-oleh-separatis-dan-kurator-lt519d0870c12f3/)

HukumOnline.Com, “Mengintip Proses Eksekusi Harta Pailit oleh Separatis dan Kurator”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengintip-proses-eksekusi-harta-pailit-oleh-separatis-dan-kurator-lt622c7b58a81bc/?page=all>

HukumOnline.Com, “Perbedaan Antara Kepailitan dengan PKPU”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-dagang-lt50c3529a6061f>

HukumOnline.Com, “Perbedaan Kepailitan dengan Insolvensi”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kepailitan-dengan-insolvensi-lt5ad55778bf98f/>

HukumOnline.Com, “Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pkpu-sementara-dan-pkpu-tetap-lt5ade9a469d120/>

HukumOnline.Com, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>

Kamus Tokopedia, “Insolvensi”. <https://kamus.tokopedia.com/i/insolvensi/>

Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan HAM, “Kemenkumham Jabar Ikuti Seminar Kepailitan BHP Jakarta “Pelaksanaan Sita Umum Kepailitan Dengan Sita Pidana”. <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita->

[utama/kemenkumham-jabar-ikuti-seminar-kepailitan-bhp-jakarta-pelaksanaan-sita-umum-kepailitan-dengan-sita-pidana#:~:text=Sita%20kepailitan%20adalah%20sita%20terhadap,berada%20di%20bawah%20kekuasaan%20negara](#)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Bagaimana Pengaturan Jaminan Dalam Perspektif KUHPerduta”.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15934/Bagaimana-Pengaturan-Jaminan-Dalam-Perspektif-KUHPerduta.html>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Eksekusi Hak Tanggungan pada Kredit Macet”.

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/3991/Eksekusi-Hak-Tanggung-pada-Kredit-Macet.html

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitor Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan”.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitor-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html>

Kompas.com, “4 Prinsip Usaha Bank”.

<https://www.kompas.com/skola/read/2023/03/29/200000069/4-prinsip-usaha-bank-?page=all>

LEGALKU, “Hukum Jaminan dalam Indonesia”.

<https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia/>

MNC Bank, “Yuk, Mengenal Jenis Kegiatan Usaha Bank”.

<https://mncbank.co.id/post/yuk--mengenal-jenis-kegiatan-usaha-bank>

Otoritas Jasa Keuangan, “Lembaga Perbankan”.

<https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar->

[perbankan/Pages/Lembaga-](https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-)

[Perbankan.aspx#:~:text=Funcsi%20utama%20perbankan%20Indonesia](https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan.aspx#:~:text=Funcsi%20utama%20perbankan%20Indonesia%20adalah,peningkatan%20taraf%20hidup%20rakyat%20banyak)

[a%20adalah,peningkatan%20taraf%20hidup%20rakyat%20banyak](https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan.aspx#:~:text=Funcsi%20utama%20perbankan%20Indonesia%20adalah,peningkatan%20taraf%20hidup%20rakyat%20banyak)

Pengadilan Negeri Pulau Pisau, “Problematika Eksekusi Hak Tanggungan

Dalam

Kepailitan”.

<https://pn->

[pulangpisau.go.id/AcTeGEhLOpDA9zo15dfIMx3sCqjU4RSbrwnB8k](https://pn-pulangpisau.go.id/AcTeGEhLOpDA9zo15dfIMx3sCqjU4RSbrwnB8k)

[P2ZauVlm6FNig7QyXWYH0KvJt](https://pn-pulangpisau.go.id/AcTeGEhLOpDA9zo15dfIMx3sCqjU4RSbrwnB8kP2ZauVlm6FNig7QyXWYH0KvJt)

SAH! Sumber Artikel Hukum, “Ubi Societas Ibi Ius, Dimana Ada Masyarakat

Disitu Ada Hukum”. <https://sah.co.id/blog/ubi-societas-ibi-ius-dimana->

[ada-masyarakat-disitu-ada-hukum/](https://sah.co.id/blog/ubi-societas-ibi-ius-dimana-ada-masyarakat-disitu-ada-hukum/)

G. Kamus atau Encyclopedia

Bryan A. Garner, Black Law’s Dictionar (Eight Edition), (Minnesota:

Thompson, 2009)

Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud,

2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>

Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud,

2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sita>

H. Wawancara

Hasil wawancara dengan Sahat Marulitua Sidabukke, advokat, pengajar magister kenotariatan dan magister hukum, pemilik kantor Advokat & Konsultan Hukum Sidabukke & Partners, Plaza Senayan, Jakarta Selatan, 6 November 2023, Pukul 15.30 wib.

Hasil wawancara dengan Anthony Prawira, advokat, kurator, pengajar bidang PKPU dan Kepailitan, Dewan Standar Profesi AKPI, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat AAI, google meet (*online*), Tangerang, 14 November 2023, Pukul 14.00 wib.

